



Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Samsat Seluruh Kota Surabaya)

Moch Romadhon

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis: 1221900035@surel.untag-sby.ac.id

Ontot Murwanto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: ontotms@untag-sby.ac.id

Abstract. *The main source of state revenue is taxation, and one of them is motor vehicle tax. Respecting tax duties, like paying money for public welfare, is a constructive contribution. The aim of the following research is to understand how the SamSat drive through system, service quality, and taxpayer awareness influence motor vehicle tax compliance. Distributing questionnaires to samples that have been determined in Samsat throughout Surabaya City is a technique for collecting data in the following research. The sampling method selects a random sample of vehicle tax payer respondents. The sample consisted of 90 people. The findings show that SAMSAT drive thru, service quality, and, knowledge, of mandatory, taxes, all contribute to better vehicle tax compliance. In the city of Surabaya, the drive thru samsat system ($0.027 < 0.05$), service quality ($0.008 < 0.05$), and taxpayer awareness ($0.000 < 0.05$) all have a good impact on motor vehicle taxpayer compliance.*

Keywords: *Influence of taxpayer awareness, service quality, drive thru Samsat system, taxpayer compliance*

Abstrak. Sumber utama penerimaan negara adalah perpajakan, dan diantaranya ialah pajak kendaraan bermotor. Menghormati bea pajak, seperti membayar uang untuk kesejahteraan masyarakat, merupakan kontribusi yang konstruktif. Tujuan dari riset berikut ialah guna memahami bagaimana pengaruh sistem SamSat drive through, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak atas kepatuhan wajib pajak kendaraan motor. Penyebaran kuesioner kepada sampel yang telah ditetapkan di Samsat se-Kota Surabaya menjadi teknik dalam menghimpun data pada riset berikut. Metode pengambilan sampel memilih sampel acak responden wajib pajak kendaraan. Sampel berjumlah 90 orang. Temuan menunjukkan bahwa samsat drive thru, kualitas layanan, dan, pengetahuan, wajib, pajak, semuanya berkontribusi pada kepatuhan wajib pajak kendaraan yang lebih baik. Di Kota Surabaya, sistem samsat drive thru ($0,027 < 0,05$), kualitas pelayanan ($0,008 < 0,05$), serta kesadaran wajib pajak ($0,000 < 0,05$) semuanya berdampak baik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci: Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sistem samsat *drive thru*, kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Indonesia hingga saat ini sebagai negara berkembang terus membangun untuk memenuhi fasilitas publik sebagai sarana penting bagi masyarakat. Pajak adalah pembayaran wajib kepada pemerintah, baik itu kepada individu atau perusahaan terkait oleh hukum lalu dipekerjakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan warganya tanpa menerima imbalan finansial apa pun. Pajak daerah yakni pembayaran yang harus dilakukan untuk daerahh kepada rakyat atau masyarakat dimana menurut peraturan wajib membayarnya namun tidak menerima manfaat utuh, selaras pada UU Harmonisasi Perpajakan No.7/2021, dan digunakan untuk kebutuhan daerah guna mencapai kemakmuran rakyatnya.

Pada organisasi pemungutan. Dua kategori pajak adalah pajak pusat juga pajak daerah. Pajak provinsi juga pajak daerah adalah dua kategori di mana pajak daerah itu sendiri termasuk. Untuk membangun negara, pemerintah harus menghimpun dana yang cukup, sehingga diperlukan kebijakan perpajakan untuk menunjang penerimaan negara dan daerah Madiasmo (2018:7).

Permendagri No. 82 Tahun 2022 tentang Alasan acuan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, pada pasal 1 ayat 3 ditegaskan definisi “Pajak Kendaraan Bermotor dimana selanjutnya disingkat PKB ialah pajak terkait penguasaan maupun kepemilikan Kendaraan Bermotor”. Tentu saja pajak itu wajib dan wajib bagi setiap pemilik kendaraan bermotor. Tabel dibawah ini memberikan informasi jumlah daftar pembayaran pajak kendaraan bermotor yang ada diwilayah Kota Surabaya:

**Tabel 1. Total Akumulasi Pembayaran PKB diwilayah Surabaya
(2019-2022)**

No	Tahun	Jumlah Objek Pajak Kendaraan	Tidak Melakukan Pembayaran	Melakukan Pembayaran	Presentase
1	2019	1.991.202	314.093	1.677.109	84%
2	2020	1.928.370	425.299	1.503.071	78%
3	2021	1.861.908	347.145	1.514.763	81%
4	2022	1.860.083	367.848	1.492.235	80%

Sumber: Data BAPENDA JATIM, diolah oleh penulis

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, nyatanya masih cukup banyak Wajib Pajak Kendaraan yang tidak melunasi kewajiban Pajak Kendaraan Bermotornya. Berdasarkan tabel di atas, antara tahun 2019 dan 2020 tren wajib pajak yang tidak membayar retribusi pajak meningkat, namun ditahun 2020-2021 mengalami penurunan. Selanjutnya di tahun 2021 ke tahun 2022 jumlah wajib pajak yang mengirimkan pembayarannya bertambah sebanyak 367.848. Sedangkan untuk rincian wajib pajak yang melakukan pembayaran trennya justru cenderung menurun diikuti dengan penurunan jumlah objek pajak kendaraan bermotor.

Rumusan Masalah

1. Apakah meningkatkan kesadaran pembayar pajak berdampak pada kepatuhan?
2. Apakah meningkatkan Pelayanan yang Berkualitas berdampak pada kepatuhan ?
3. Apakah meningkatkan Sistem Samsat ‘Drive Thru’ berdampak pada kepatuhan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan kejadian-kejadian tersebut di atas, riset berikut berusaha guna memahami pengaruh pemahaman wajib pajak yang dirasakan, pelayanan prima, serta sistem samsat drive-through pada kepatuhan wajib pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Definisi Pajak

Definisi Dr, Soeparmann Soemahamijaya dalam Salim (2020), pajak yakni pemberian berbentuk materi atau nilai uang dan ditarik dari pemerintah sesuai dengan undang-undang untuk membayar pengeluaran terkorelasi oleh pembuatan material dan jasa untuk kepentingan masyarakat. komunitas yang lebih besar. Pungutan dicirikan sebagai komitmen untuk kerja sama semua warga negara terhadap negara.

Fungsi Pajak

Retribusi memiliki dua kemampuan menurut Mardiasmo (2018:4), yaitu sebagai berikut:

- a. Kemampuan Penerimaan/Budgetair (Pendanaan Negara) Pungutan mempunyai kemampuan pendapatan/anggaran, artinya pengeluaran merupakan sumber pendapatan negara untuk mendanai konsumsi rutin dan perbaikan.
- b. Tujuan Regulasi (Berkelanjutan) Pajak memiliki fungsi regulasi, artinya dapat digunakan untuk melaksanakan dan mengatur kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu di luar sektor keuangan, tata kelola sosial dan ekonomi.

Jenis Pajak

Ada beberapa macam biaya terbagi ke dalam beberapa poin Mardiasmo (2018:7), yakni bersumber kelasnya, kecenderungannya, dan bersumber lembaganya.

Sistem penarikan perpajakan

Terdapat berbagai macam aturan pemungutan perpajakan yang dikutip dari Sakinah (2018):

- a. *Official aassesment system*
- b. *Self aassesment system*
- c. *Witholding systeem*

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Dalam konteks berikut, PKB juga termasuk retribusi provinsi sihimpun Pemda Tier 1. pajak kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor Pajak Daerah. Pemilik kendaraan bermotor dan pengemudinya dikenakan Pajak Daerah 28 Tahun 2009.

Kepatuhan WPOP

Menyelaraskan adalah tunduk, dan menaati undang-undang yang ada. Menurut Rahayu dalam Agun 2022 ketaatan WPOP bisa dilihat sebagai prasyarat bagi WP guna melaksanakan kewajibannya juga melakukan hak perpajakannya.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Muliary (2017), persepsi WP yaitu kesediaan seseorang untuk secara sukarela mematuhi kewajiban perpajakannya. Ketaatan WP tinggi diikuti peningkatan kesadaran wajib pajak akan pajak karena menjalankan dan mengerti perihal kewajiban pajaknya dengan lebih baik.

Kualitas Pelayanan

Menurut Nurhidayati dan Silpia (2018), suatu jenis kegiatan yang disebut jasa adalah suatu aktivitas yang ditawarkan satu atau lebih pihak untuk pihak lain yang terkait dengannya atas maksud guna memuaskan kedua belah pihak yang berkepentingan atas barang dan jasa yang mereka suplai. Arianto (2018) berpendapat bahwa fokus pada pencapaian harapan pelanggan serta permintaan dan persyaratan dengan cepat merupakan keunggulan layanan. Rahayu (2017:134) menyatakan bahwasanya pelayanan perpajakan ialah layanan yang disediakan kepada masyarakat umum dari Departemen Pajak (DJP) agar masyarakat dapat memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya..

Sistem Drive Thru

Dalam bentuk bukti pembayaran STNK, PKB, dan SWDKLLJ, Samsat Drive Thru ialah layanan yang memungkinkan penyelesaian transaksi tanpa wajib pajak harus keluar dari kendaraannya (Wardani dan Rumiyaun, 2017).

HIPOTESIS

Hipotesis dari penelitian ini adalah:

H¹ : Kesadaran wajib pajak berdampak positif atas Kepatuhan wajib pajak

H² : Kualitas pelayanan berdampak positif atas Kepatuhan wajib pajak

H³ : Sistem samsat *drive-thru* berdampak positif atas Kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Pada riset berikut, metodologi kuantitatif diterapkan. Pendekatan kuantitatif adalah teknik untuk menguji hipotesis yang sudah ada sebelumnya dengan menganalisis data statistik dan menggunakan data penelitian numerik (Sugiono, 2021).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan ke kantor Samsat diseluruh Kota Surabaya. Subyek penggeledahan adalah Wajib pajak PKB tercatat di kantor Samsat seluruh kota Surabaya. Riset berikut berlangsung pada tahun 2023 dengan mengacu pada data sebelum tahun 2023.

Jenis dan Sumber Data

Temuan riset berikut merupakan data kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah teknik pengujian hipotesis yang dibuat-buat dengan menganalisis data statistik dan menggunakan data penelitian numerik (Sugiono, 2021). Sedangkan sumber data penelitian menggunakan kuesioner dimana kuesioner tersebut merupakan data primer dan digunakan untuk mengetahui pendapat responden dengan skala tertentu.

Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2021: 126), populasi ialah keompok luas yang mencakup individu maupun item yang telah ditentukan peneliti guna dipelajari sehingga mereka dapat mempelajarinya lebih lanjut dan menarik kesimpulan darinya. Demografi yang peneliti gunakan ialah wajib pajak yang tercatat pada Samsat Kota Surabaya.

Sugiyono, 2021:127 “Proporsi atau jumlah dan karakteristik populasi” merupakan sampel. Maka sebab itu, sampel yang diambil melalui suatu populasi dianggap secara akurat mencerminkan keberadaan populasi itu. Menurut Widiyanto (2018:35), suatu rumus dapat digunakan untuk menentukan apakah sampel yang cukup besar mewakili populasi ketika jumlahnya tidak diketahui

$$n = \frac{Z^2}{4 (Moe)^2}$$

Informasi :

n = total sampel

Z = skor Z dimana kepercayaan 95% sehingga skor Z = 1,96 (tabel distribusi normal).

Moe = margin of error (kesalahan maksimum) hingga 10 %.

Melalui penggunaan error 10%, dengan begitu total minimal sampel yang bisa dipergunakan adalah:

Jumlah objek yang dikenakan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2022: 1.860.083

$$n = 1,9^2 / 4 (0,10)^2$$

n = 90, pembulatan dari 90,25

Teknik Pengkoleksian Data

Sumber (Sugiyono, 2021) mengklaim bahwa data dibagi menjadi dua kategori: data pertama dan kedua. WP KB diminta untuk jujur menjawab serangkaian pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini.

Skala Likert yang dikembangkan oleh Sugiyono (2021) menilai sikap, persepsi, dan pandangan seseorang atau kelompok terhadap masyarakat. Pada skala Likert, reaksi para peneliti berkisar dari sangat positif hingga negatif. Peneliti memberikan nomor pada solusi untuk memeriksa masalah tersebut.

Tabel 2. Interval Skala

No.	Deskriptif	Nilai
1.	Sangat setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Netral (N)	3
4.	Tidak setuju (TS)	2
5.	Sangat tidak setuju (STS)	1

HASIL

Output Uji Validasi

Tabel 3. Uji Validasi 90 Sampel

Item	Hasil Korelasi (r-hitung)	Nilai Kritis N = 90 (rtabel)	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)			
x1.1	,304	0,1729	Data Tervalidasi
x1.2	,438		Data Tervalidasi
x1.3	,349		Data Tervalidasi
x1.4	,355		Data Tervalidasi
x1.5	,448		Data Tervalidasi
Kualitas Pelayanan (X2)			
x2.1	,546	0,1729	Data Tervalidasi
x2.2	,548		Data Tervalidasi
x2.3	,684		Data Tervalidasi
x2.4	,554		Data Tervalidasi
x2.5	,314		Data Tervalidasi
Sistem Samsat Drive Thru (X3)			
x3.1	,681	0,1729	Data Tervalidasi
x3.2	,650		Data Tervalidasi
x3.3	,617		Data Tervalidasi
x3.4	,641		Data Tervalidasi
x3.5	,652		Data Tervalidasi
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)			
y1	,564	0,1729	Data Tervalidasi
y2	,568		Data Tervalidasi
y3	,690		Data Tervalidasi
y4	,665		Data Tervalidasi
y5	,676		Data Tervalidasi

Sumber: Output dari SPSS, data diolah oleh peneliti

Berdasarkan informasi di atas, dapat dikatakan bahwa semua alat penelitian yang digunakan memiliki nilai lebih besar dari nilai kritis (rtabel). Indikator instrumen penelitian tersebut valid dan dapat dilakukan studi tambahan dengan menggunakan indikator tersebut..

Hasil Uji Reliabilittas 90 Responden

Menggunakan pendekatan Alpha Cronbach untuk uji reliabel. Jikalau koef alpha lebih besar 0,6 sehingga nilai tersebut memiliki peringkat ketergantungan yang tinggi (Ghozali, 2011:11). Dan temuan analisis koefisien dependabilitas adalah sebagai berikut::

Tabel 4. Hasil Reliabel 90 Sampel

Var.	Nilai <i>Cronbacs Alpa</i>	Angka Kritis	Hasil
X1	0,719	0,6	Lolos reliabilitas
X2	0,786	0,6	Lolos reliabilitas
X3	0,780	0,6	Lolos reliabilitas
Y	0,748	0,6	Lolos reliabilitas

Sumber: Output dari SPSS, dikelola oleh penulis

Nilai koefisien dependabilitas untuk Cronbacs alpa lebih besar 0,6, sesuai hasil di atas. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa alat atau kuesioner yang dikirimkan kepada 90 responden dapat dipercaya dan digunakan kedepannya dalam proses penelitian.

Hasil Uji Normalitas

Model regresi yang benar adalah penelitian dinyatakan normal. Salah satu cara mengrtahui data tersebut berdistribusi normal adalah dengan melakukan pengujian statistik Kolmogorov-Smirnov. Dengan Asymp, data terdistribusi secara normal. Sig hasil perhitungan (dua sisi) lebih besar dari 0.05. Di bawah ini output uji tersebut:

Tabel 5. Hasil Perhitungan Uji Normalitas menggunakan K-S

Model	Coefficients ^a	
		Unstandardized Residual (UR)
1	Rata-rata	,000000
	Std. Deviation	,7584072
	Absolute	,089
Coefficients^a	Positive	,089
	Negative	-,066
Model		,089
		,075 ^c

Sumber: Output SPSS

Data memiliki distribusi normal yang lebih tinggi dari 0,05, seperti yang ditunjukkan oleh Asymp. Nilai Sig (2-tailed) sebesar 0,075 pada tabel tersebut di atas. Hasilnya, dapat dikatakan bahwa data tersebut lolos uji kenormalan.

Hasil Uji Multikolonieritas

Berdasarkan skor toleransi dan Faktor Inflasi Varians, juga dikenal sebagai (VIF), untuk variabel independen di setiap penelitian, kami dapat menentukan hasil pengujian:

Tabel 6. Output Uji Multikolonieritas

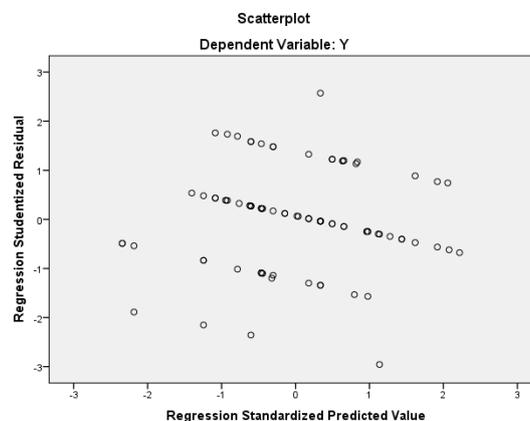
Deskriptif Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Kesadaran WP	0,966	1,035	Lolos Uji Multikolo
KP	0,980	1,021	Lolos Uji Multikolo
Sistem SDT	0,986	1,014	Lolos Uji Multikolo

Sumber: dari Output SPSS, data dikelola oleh penulis

Tabel tersebut memperlihatkan bahwasanya tidak terdapat hubungan antara faktor independen dan variabel independen multikolinieritas karena semua variabel independen dan moderasi yang dipakai pada riset berikut memiliki skor tolerance $> 0,1$ dan Variant Inflation Factor (VIF) 10.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model homoskedastisitas adalah model uji regresi yang dianggap baik. Selanjutnya plot antara nilai presisi ZPRED dengan residual SRESID dari variabel-variabel terkait dapat digunakan untuk mengetahui apakah terjadi heteroskedastisitas. Sisa yang dipelajari ditunjukkan pada sumbu x, sedangkan sisa yang diantisipasi ditunjukkan pada sumbu y. Uji heteroskedastisitas menghasilkan temuan seperti ini.:



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: SPSS

Ilustrasi di atas menunjukkan bagaimana setiap titik tersebar secara acak dan berada di bawah atau di atas nilai sumbu Y 0. Dengan begitu, bisa kita nyatakan model riset berikut memenuhi pengujian asumsi klasik yang terakhir yaitu uji heteros.

Hasil Uji t

Kondisi pengujian berikut digunakan dalam uji-t guna menguji dampak parsial variabel independent atas variabel dependent:

- Bila skor $t < \alpha$ = hipotesis diterima.
- Bila skor $t > \alpha$ = hipotesis ditolak.

Hasil uji t bisa dicermati pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Uji t

Model		Coefficients ^a		Standardized	T	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Coefficients		
	B			Beta		
1	(Constant)	11,354	3,047		3,726	,000
	X1	,260	,197	,212	2,653	,000
	X2	,240	,189	,216	2,444	,008
	X3	,235	,104	,233	2,255	,027

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan data yang ada di atas “Kesadaran Wajib Pajak” dengan angka 0,000 < 0,05, alhasil ditetapkan bahwasanya H₁ dapat diterima. Dari sini menunjukkan “Kesadaran Wajib Pajak” berpengaruh (+) kepada KWP.

Nilai signifikansi “Kualitas Pelayanan” dengan angka 0,008 < ; 0,05, sehingga dinyatakan H₂ dapat diterima. Dari sini menunjukkan “Kualitas Pelayanan” berpengaruh positif kepada KWP.

Nilai signifikansi “Sistem Samsat Drive Thru” diketahui angka 0,027 < ; 0,05, sehingga dinyatakan H₃ dapat diterima. Dari sini menunjukkan “Sistem Samsat Drive Thru” berdampak positif kepada KWP.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan berikut bisa diambil melalui hipotesis yang diajukan dan divalidasi oleh peneliti:

1. Terbukti bahwasanya variabel “Kesadaran Wajib Pajak” berdampak positif atas “kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor”. Sehingga dinyatakan tingkat “Kesadaran Wajib Pajak” berkorelasi positif dengan “kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor”.
2. Terbukti bahwa variabel kualitas pelayanan berdampak positif atas “kepatuhan pajak kendaraan bermotor”. Sehingga dinyatakan tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor meningkat seiring dengan meningkatnya “Quality of Service”.
3. Terbukti bahwa variabel “Sistem Samsat Drive Thru” berdampak baik atas “kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor”. Sehingga dinyatakan efektivitas sistem “Samsat Drive Thru” berkorelasi dengan “kepatuhan pajak kendaraan bermotor yang lebih baik”.

Saran

Saran untuk Samsat yang ada di Kota Surabaya ataupun Samsat lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia agar melakukan peningkatan layanan secara berlanjut. Hal ini dimaksud agar dapat meningkatkan penerimaan negara khususnya di sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Peningkatan pendapatan negara tentu menjadi manfaat untuk kita semua warga negara Indonesia karena pajak akan kembali pada kita seperti fasilitas umum dan menunjang keberlangsungan Negara Republik Indonesia tercinta. Kemudian untuk seluruh pemilik kendaraan diharapkan semakin patuh dalam menjalankan kewajibannya khususnya di sektor Pajak Kendaraan Bermotor sekaligus memberikan sumbangsih positif terhadap negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rusydi. 2018. *Manajemen Pemasaran*. Bandung: Alfabeta.
- Arianto, N., Patilaya, E. 2018. Pengaruh Kualitas Produk Dan Kelengkapan Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Salt N Pepper Pada Pt Mitra Busana Sentosa Bintaro. *Jurnal Kreatif: Pemasaran, Sumberdaya Manusia dan Keuangan*, Vol. 6, No. 2.
- Afifah, S. N, & Prastiwi, Dewi. 2019. Pengaruh Aktivitas Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Unesa*, Vol. 7 No. 3, Mei 2019.
- Agun, Winny Aprilia Nurita Ujur., L.K. Datrini., A.A.B. Amlayasa. 2022. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*. Vol. 6(1).

- Andi, A. dan D. N. Sari. 2017. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penggunaan E-Filing Pada KPP Pratama Serang. *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 10(1): 41-62.
- Arisandi, Nelsi. 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 14(1).
- Astana, W. S. dan L. A. Merkusiwati. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Journal* 18(1):818-846.
- Basri, H., dan A.A.A. Ahad. 2018. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Supremasi*. Vol. 8(1).
- Hadi, Nor. 2018. Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Aksar*, Vol. 1 (2).
- Ischabita, Nafisa., Hardiwinoto, Nurchayono. 2022. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Portofolio*. Vol. 2(2).
- Ilhamsyah, Randi et al. 2016. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan WP tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan* Vol.8 No.1
- Info. [dipendajatim.go.id](https://info.dipendajatim.go.id). 2022. Info Pendapatan Asli Daerah. Diakses pada 22 Maret 2023, dari https://info.dipendajatim.go.id/index.php?page=info_pad.
- Jatim.bps.go.id. 2021. Jumlah dan Jenis Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur 2018–2020, Diakses pada 7 Mei 2023, dari <https://jatim.bps.go.id/statictable/2021/09/07/2253/jumlah-kendaraan-bermotor-yang-didaftarkan-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-provinsi-jawa-timur-unit-2018-2020.html>
- Krisnadeva, Anak Agung Ngurah dan N.K.L.A. Merkusiwati (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *e-Jurnal Akuntansi*, Vol. 30(6).
- Kurnia, R. S. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kurniawan, Andi. 2021. Pengaruh Independensi Dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol 10(10).
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muliari, N.K., dan P.E., Setiawan. 2010. “Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Nurhidayati dan R. Silpia. 2018. Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi. *Jurnal Sekretari dan Manajemen*. Vol. 2(8).

- Rizal, Anis Syamsu. 2019. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, Volume 7, Nomor 1.
- Sakinah, Anzala. 2018. Implementasi Kebijakan Sistem Pemungutan Pajak Self Assessment. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 1 (1).
- Salim, Agus., F. Adziem., R. Wahyudi. 2020. Penerapan Pelaporan Pajak Berbasis E-Filing Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Perpajakan*. Vol. 3(1).
- Sendjaja, S. D. 2004. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Simanjuntak dan Mukhlis, 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Membangun Ekonomi*, Penerbit RAS.
- Sugiyono, 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (M.Dr. Ir. Sutopo, S.Pd (ed); ke2 ed).
- Taxacademy.id. 2022. Sektor yang Berkontribusi Menyumbang Pajak Terbesar di Indonesia. Diakses pada 22 Maret 2023, dari <https://taxacademy.id/2022/12/14/sektor-yang-berkontribusi-menyumbang-pajak-terbesar-di-indonesia/>.
- Tjaraka, Heru. taxcenter.vokasi.unair.ac.id. 2021. Kepatuhan Pajak Dalam PMSE. Diakses pada 07 Mei 2023, dari <https://taxcenter.vokasi.unair.ac.id/wpcontent/uploads/2021/10/WEBINAR-TAX-CENTER-PMSE.pdf>
- Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Waluyo. 2018. The Effect of Addition of Taxpayers Number, Tax Audit, Tax Billing, and Taxpayers Compliance Toward Tax Revenue. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 1(1).
- Wardani, Dewi K dan Rumiya. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi* Vol 5 (1).
- Widianto, Joko.2018. *Evaluasi Pembelajaran*. Jawa Timur: Unipma Press.
- Yadinta, Pipit Awwalina Farihin., Suratno, JMV Mulyadi. 2018. Kualitas Pelayanan Fiskus, Dimensi Keadilan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*. Vol. 5(2).